

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN BASUKI
TJAHAJA PURNAMA (AHOK) TERKAIT ISU SARA DALAM
PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017 DALAM MEDIA
ONLINE KOMPAS.COM**

Roy Marten, Dina Fadiyah

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta – Jalan Sunter Permai Raya Tanjung Priok

Email: roymarten060@gmail.com

ABSTRAK

The Purpose of this paper research is to find out how the framing conducted by Kompas.com Media Associated with alleged blasphemy by Basuki Tjahaja Purnama, and want to see more about the procedures or techniques used by Kompas.com in placing and positioning related news the issues of sara or blasphemy by Ahok. As for analyzing this, the writer used the framing model of Pan and Gerald M. Kosicki, in which there are 4 types of structure, namely, syntactic structure (the way journalists compile facts), script structures (how journalists tell facts), thematic structures (how journalist write facts) and rhetorical structure (the way journalist emphasize facts). As well as looking at the relationship between the media and politics in the Ahok case with media and political theory.

In writing this paper the writer used qualitative methods. The results of this research Media Kompas.com appear neutral in reporting the news by presenting many sources, informants and information in supporting the news reported. However, on the other hand, Kompas.com indirectly made certain protests in certain directions with a point of view that aligned with the suspect Basuki Tjahaja Purnama on the news displayed by Kompas.com.

Keywords : Framing Analysis, DKI Jakarta Election, SARA, Kompas.com, Ahok

PENDAHULUAN

Pada penelitian ini penulis akan membahas terkait “Analisis Framing Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Terkait Isu SARA Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Dalam Media Online Kompas.com. Pemilihan umum daerah atau biasa disebut sebagai Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang selalu digunakan oleh sebuah negara guna stabilnya suatu sistem yang ada antara pusat dan daerah untuk itulah keberadaan pemimpin sangatlah penting dalam memimpin suatu wilayah. Karena pemimpin daerah sebagai aktor yang berperan dalam penyambung lidah antara rakyat dan pusat serta negara. Pilkada menurut Ramlan adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Ramlan,1992:181).

Dalam regulasi yang ada mengenai proses tahapan pemilihan. Pemimpin dan para calon kandidat menggunakan media sebagai alat komunikasi politik. Keberadaan media massa dapat memberikan kontribusi bagi para politisi untuk mempromosikan dan memperkenalkan dirinya serta menawarkan visi dan misinya pada masyarakat. Karena media massa juga merupakan entitas yang strategis sebagai tempat dalam menyampaikan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa media merupakan suatu alat yang memiliki hubungan dengan politik ada pada hubungan pada orang banyak. Kedua ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnnya. Dalam pelaksanaannya politik berurusan dengan ideologi, dan topik ideologi yang tentunya menyangkut kehidupan sosial masyarakat. sementara media sendiri sebagai jembatan antara topik atau tema yang diangkat yang disebarkan pada khalayak.

Dalam pelaksanaannya secara teoritis, keduanya bisa berjalan dengan

harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat terhadap para politisi. Fungsi dari media sendiri adalah sebagai ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang-orang banyak. Seperti kita ketahui ada banyak sekali suatu kepentingan-kepentingan politik pada saat pemilu berlangsung tak terkecuali media, pada pelaksanaannya apakah media massa dapat menempatkannya secara proporsional. Pada aktivitas politik apakah ada golongan tertentu dikedepankan dari pada golongan politik lainnya. Dalam aktivitas politik, media massa juga sering kali menemui suatu kesulitan-kesulitan tersendiri. Disatu sisi, media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa atau pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan memiliki pemikiran yang mendalam pada peristiwa politik.

Terutama Pemilu serentak menjadi pemilu yang menarik untuk dibahas dimana pada saat keberlangsungan pemilihan kepala daerah yang ada di berbagai provinsi yang tersebar di Nusantara khususnya DKI Jakarta, hubungan antara media dan politik sangat terlihat melalui media massa cetak maupun elektronik, relasi yang paling jelas antara media dan politik adalah ketika menjelang masa pemilu dan pada saat pemilu berlangsung dimana terdapat iklan politik yang memenuhi media massa cetak maupun elektronik. Seperti yang kita lihat pada hampir di setiap stasiun Televisi terdapat aktivitas kampanye politik dengan memanfaatkan iklan politik di media massa, terutama televisi karena lewat iklan tersebut calon pemilih dapat mengetahui secara jelas mengenai visi dan misi dari pasangan calon yang ada. Hubungan antara media dan politik juga dapat dilihat pada pemilik media massa yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai politiknya. Dengan memanfaatkan pemberitaan- pemberitaan yang ada di dalam media massa untuk kepentingan aktivitas politik.

Pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media-media yang

menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai topik pembahasan yang dominan yang pemberitaannya sering menghiasi pemberitaan di media-media Indonesia. Kasus ini diawali lewat perkataan dari salah satu pasangan calon yaitu Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama pada kunjungannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Jakarta yang pada saat itu menyingung mengenai surat Al Maidah ayat 51. Munculnya isu mengenai keyakinan beragama menjadi salah satu konflik dalam pemilukada yang sedang berlangsung. Terlebih lagi hal ini mengikutsertakan para elit agama dalam politik yang membuat persaingan di masing-masing partai dengan partai lainnya. Sehingga aksi saling sikut menyikut dalam keberlangsungan pemilu menjadi hal yang wajar terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memenangkan pemilihan yang diinginkan.

Keterkaitan media dan politik terlihat jelas lewat berita yang diberitakan yaitu berita isu sara yang dimana pemberitaan tersebut sebagai pemberitaan utama yang menghiasi berita kedalam berita cetak maupun elektronik. Media massa baik cetak maupun elektronik pada dasarnya merupakan sebuah alat penyampai informasi. Media massa sendiri pada era modern dijadikan sebagai sarana komunikasi politik pada sistem politik untuk menciptakan citra politik, pendapat umum dan juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik yang ada pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari media massa seperti media sosial, Televisi, surat kabar dan lain sebagainya.

Analisis Framing

Analisis framing merupakan model terbaru dari analisis pendekatan analisis wacana, khususnya dalam menganalisa teks pada media. Ide dan gagasan framing sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Beterson tahun 1955. Konsep framing atau frame sendiri bukanlah murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi pinjaman dari ilmu kognitif (psikologis). Berdasarkan perspektif analisis framing digunakan media sebagai cara-cara ideologi pada media saat mengkonstruksi realitas analisis framing guna mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, menarik, penting atau lebih diingat,

dalam menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Tabel 1 : Teori Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS		headline, lead, latar
Cara wartawan Menyusun fakta	1. Skema Berita	informasi, kutipan,
SKRIP 5w+1H Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	sumber, pernyataan, penutup
TEMATIK Cara wartawan, Menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat	paragraf, Proporsi kalimat hubungan, antar kalimat
RETORIS wartawan menekankan fakta		Kata, idiom, cara Gambar/foto, grafik

Media dan Politik

a. Pengertian Media

Secara Bahasa, kata media berasal dari bahasa latin “medius” yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media diartikan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun pengertian media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk dapat menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Hamidjo dalam Latuheru (1993), memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga dapat sampai ke penerima yang dituju.

b. Peran media dalam politik

Menurut (Habermas, 1984) pentingnya ketersediaan kanal-kanal “komunikasi yang tidak terdistorsi” yang adalah sarana utama pembebasan bagi partisipasi di dalam ranah publik tempat dimana individu-individu dapat berinteraksi dengan masyarakat luas. Tidak bisa dipungkiri, bahwa penyediaan kanal yang objektif dan imparial akan membantu kelompok minoritas untuk terlibat jauh lebih aktif. Dengan kata lain, “komunikasi yang tidak terdistorsi” akan memberdayakan kelompok minoritas dalam menuntut posisi setara, pun menuntut yang setara. Merujuk kembali berdasarkan konsep dari Habermas, ranah publik yang ideal seharusnya tidak terinstitusionalisasi, harus dapat diakses oleh siapapun juga, serta memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat, dalam hal ini dapat diklaim oleh negara atau pasar.

Kemudian Marshall McLuhan dalam karyanya *understanding Media: The Extension of man* (1964) mengajukan sebuah gagasan yang “menyediakan” sebuah perwakilan pemerintah yang tidak langsung melalui teknologi media yang terus berkembang untuk memperluas partisipasi model baru dimana setiap orang dapat

terlibat. Ia menekankan bahwa pentingnya representasi pemerintahan secara tidak langsung karena hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat secara keseluruhan terlalu banyak, terlalu rumit, dan terlalu samar untuk dipahami oleh warga. (The Phantom Public Lippmann, 1927).

Menurut McLuhan berkembangnya teknologi media tidak hanya membuat seluruh dunia bisa diakses secara lokal tetapi juga menciptakan sebuah bentuk partisipasi baru dimana setiap orang dapat terlibat dalam setiap isu global. Dalam beberapa hal, kondisi ini berpotensi meningkatkan kesadaran sosial masyarakat karena mereka mulai bereaksi terhadap isu-isu global dan implikasinya terhadap persoalan lokal meskipun McLuhan juga mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi untuk tidak tanggap terhadap isu-isu lokal (McLuhan, 1964).

Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan, dimana para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakannya sebagai tempat mengampanyekan partai politiknya dan beberapa hal yang dapat menguntungkan aktor pelakunya. Adapun media massa baik cetak maupun elektronik, merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi kepada khalayak, saat ini media tidak hanya sebatas untuk menyampaikan informasi terkini menyampaikan informasi terkini mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat, namun juga dapat menjadi sarana dalam komunikasi politik.

Media digunakan para aktor politik sebagai suatu sarana dalam menyampaikan visi dan misi dari suatu partai politik atau para calon pemimpin yang sedang berkampanye. Para pelaku politik tersebut cenderung untuk menunjukkan citra yang baik partai politik atau individu aktor politik.

c. Pengertian Politik

Pengertian politik secara umum adalah sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang

berguna sebagai pembambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian politik jika ditinjau dari kepentingan penggunaanya dimana pengertian politik terbagi dua hal yaitu pengertian dalam arti kepentingan umum dan pengertian dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada di bawah kekuasaan negara maupun pada daerah.

Pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam mempengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai “Politikus” (Miriam Budiardjo, 2008:13).

Analisis Framing Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Terkait Isu Sara Dalam Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017 Dalam Media Online *kompas.com*

UNIT YANG DIAMATI	STRATEGI PENULISAN	KETERANGAN
<i>Headline</i>	Ahok bantah menghina kitab suci	<i>Headline</i>
<i>Lead</i>	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah	Paragraf 1

	merasa menghina kitab suci dalam Al Quran	
Latar informasi	saya tidak bisa menyatakan menghina Al Quran. Saya tidak mengatakan Al Quran bodoh. Saya mengatakan kepada masyarakat di Pulau	Basuki Tjahaja Purnama Paragraf 3

	Seribu jika kalian di bodohi oleh orang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci untuk tidak memilih saya, ya enggak usah pilih.	
Kutipan	Pernyataan dari Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al Maidah ayat 51	
Pernyataan	saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang (agar) tidak pilih saya	Ahok Paragraf 5
Penutup	Jadi ayat Al Quran ada yang salah enggak? Enggak salah. Konteksnya bukan itu	Paragraf 7

Analisa

Pada struktur ini berdasarkan pemaparan mengenai unit-unit yang ada pada struktur sintaksis bahwa Kompas.com melakukan frame serta dukungannya terhadap Ahok hal itu dapat dilihat dari beberapa kalimat yang ditulis pada isi berita seperti kata “tidak pernah merasa” kalimat ini merupakan suatu penegasan kepada khalayak bahwa Ahok tidak menghina ayat suci Al Quran. Sedangkan kata “enggak” sendiri merupakan kata bantu dalam berita meskipun kalimat ini tidak bersifat baku tetapi pada kalimat ini terlihat Kompas.com memberikan penekanan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan Agama. Adapun kata “agar” terdapat pada pernyataan Ahok pada paragraf 5 yang mengatakan bahwa ayat-ayat suci digunakan oleh lawan politik nya untuk tidak pilih dia.

Struktur skrip

UNSUR YANG DIAMATI	TEMUAN DALAM TEKS	KETERANGAN
Unsur 5w+1H	What (apa yang terjadi?) Ahok menyatakan bahwa pernyataan nya tidak menghina kitab suci Al Qur'an	Paragraf 1
	Who (siapa yang terlibat dalam kasus?) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).	Paragraf 2

	Where (dimana pernyataan itu dinyatakan?) Balai Kota DKI Jakarta	Paragraf 3
	When (kapan berita itu terjadi?) Jumat 7 Oktober	

	2016	
	Why (mengapa Peristiwa tersebut?) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak merasa ucapannya menghina dan melecehkan ayat suci Al Qur'an	Paragraf 4
	How (bagaimana?) Ahok mengatakan, alasanya melontarkan ucapannya yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 disebabkan ayat tersebut kerab digunakan oleh lawan politiknya untuk menyerangnya. Hal tersebut menurutnya sudah terjadi sejak ia pertama kali terjun kedunia politik pada tahun 2003 di Belitung Timur.	

Hasil Penelitian

UNIT YANG DIAMATI	STRATEGI PENULISAN	KETERANGAN
<i>Headline</i>	Ahok bantah menghina kitab suci	<i>Headline</i>
<i>Lead</i>	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah merasa menghina kitab suci dalam Al Quran	Paragraf 1
Latar informasi	saya tidak bisa menyatakan menghina Al Quran. Saya tidak mengatakan Al Quran bodoh. Saya mengatakan kepada masyarakat di Pulau	Basuki Tjahaja Purnama Paragraf 3
	Seribu jika kalian di bodohi oleh orang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci untuk tidak memilih saya, ya enggak usah pilih.	
Kutipan	Pernyataan dari Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al Maidah ayat 51	

Pernyataan	saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang (agar) tidak pilih saya	Ahok Paragraf 5
Penutup	Jadi ayat Al Quran ada yang salah enggak? Enggak salah. Konteksnya bukan itu	Paragraf 7

Analisa

Pada struktur ini berdasarkan pemaparan mengenai unit-unit yang ada pada struktur sintaksis bahwa Kompas.com melakukan frame serta dukungannya terhadap Ahok hal itu dapat dilihat dari beberapa kalimat yang ditulis pada isi berita seperti kata “tidak pernah merasa” kalimat ini merupakan suatu penegasan kepada khalayak bahwa Ahok tidak menghina ayat suci Al Quran. Sedangkan kata “enggak” sendiri merupakan kata bantu dalam berita meskipun kalimat ini tidak bersifat baku tetapi pada kalimat ini terlihat Kompas.com memberikan penekanan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan Agama. Adapun kata “agar” terdapat pada pernyataan Ahok pada paragraf 5 yang mengatakan bahwa ayat-ayat suci digunakan oleh lawan politik nya untuk tidak pilih dia.

Struktur skrip

UNSUR YANG DIAMATI	TEMUAN DALAM TEKS	KETERANGAN
---------------------------	--------------------------	-------------------

Unsur 5w+1H	What (apa yang terjadi?) Ahok menyatakan bahwa pernyataan nya tidak menghina kitab suci Al Qur'an	Paragraf 1
	Who (siapa yang terlibat dalam kasus?) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).	Paragraf 2
	Where (dimana pernyataan itu dinyatakan?) Balai Kota DKI Jakarta	Paragraf 3
	When (kapan berita itu terjadi?) Jumat 7 Oktober	

	2016	
	Why (mengapa Peristiwa tersebut?) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak merasa ucapanya menghina dan melecehkan ayat suci Al Qur'an	Paragraf 4

	<p>How (bagaimana?) Ahok mengatakan, alasannya melontarkan ucapannya yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 disebabkan ayat tersebut kerab digunakan oleh lawan politiknya untuk menyerangnya. Hal tersebut menurutnya sudah terjadi sejak ia pertama kali terjun ke dunia politik pada tahun 2003 di Belitung Timur.</p>	
--	---	--

Kesimpulan:

Struktur skrip ini menjelaskan mengenai 5W+1 H adapun penjelasan struktur diatas sebagai berikut: Kompas.com menampilkan berita secara detail mengenai Ahok, dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama tidak merasa bahwa ucapannya menghina kitab suci pada saat dirinya melakukan kunjungannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Hal ini menurutnya telah dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkannya karena tidak bisa bersaing di level substantif untuk itu berbagai cara dilakukan guna menjatuhkannya salah satunya dengan menggunakan isu sara.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fuad Afdhal, 2008. Tips dan Trik Public Relations, Grasindo Jakarta
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka.

Jakarta

Eriyanto, 2002, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Yogyakarta: LKIS

Habermas, Jurgen, 1984. The Theory of Communicative Action Vol. 1 Reason and The Rationalization of Society, diterjemahkan oleh Thomas McCarthy,

Beacon Press, Massachusetts.

Hamidjo dan Latuheru, J.D. 1993. "Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar Kin" Ujung Pandang: IKIP Ujung Pandang Press

Golding, Peter & Graham Murdock, 1997, The Political Economy of Media, Edwar Elgar Publishing

Lippman, Walter. 1927. The Phantom Public. Amerika Serikat: Penerbit Transaksi

Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; Remja Rosdakarya

Mcluhan, M. 1964. Understanding Media: The Extensive of Man (Memahami Media: Yang Ekestensif Manusia). New York: McGraw-Hill. International

Journal

Ramlan Surbakti, 1992. Memahami Ilmu Politik, Grasindo.
Sumarlan, dkk 2009, *Teori dan Praktik*

Analisis Wacana Surakarta:

Cakra Surakarta

Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung:
Alfabeta